

ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ¹

Abd.Rachim AF.

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

abdrachim@uwgm.ac.id

Abstract

Local budget of performance measurement can be used as a benchmark of local governments in the wheels of government and community development. The strategy employed to measure success is the analytic thinking of local spending, comparison shopping indirect and direct expenditures and can also categorize budgets that focus on shopping areas used as your spending apparatus and public services. Passed on the limitations of the text files obtained, then the expenses areas of the performance review in 2013.

The result is the use of indirect expenditures amounted to 43,39 % of the number of shopping areas, and direct spending amounted to 50,61 %. The use of direct expenditure turns in the translation there are fees and official travel expenditure for the benefit of apparatus. Result in personnel expenditure jumping by 54,86 % and while spending on community development or public down to the size 45,37 %

Keyword : Local; budget; performance; measurement; spending; apparatus; public

Abstrak

Pengukuran kinerja belanja daerah dapat dijadikan sebagai tolak ukur pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Cara yang digunakan untuk mengukur keberhasilan adalah analisis rasio belanja daerah, membandingkan belanja tidak langsung dan belanja langsung serta dapat pula mengelompokkan anggaran yang fokus untuk belanja daerah digunakan sebagai belanja aparatur dan belanja publik. Mengingat keterbatasan dokumen yang diperoleh, maka dilakukan kajian kinerja belanja daerah tahun 2013.

Hasilnya Penggunaan belanja tidak langsung sebesar 43,39 % dari jumlah belanja daerah, dan belanja langsung sebesar 50,61 %. Penggunaan belanja langsung ternyata didalam penjabaran terdapat honorair dan belanja perjalanan dinas untuk kepentingan aparatur. Hasilnya untuk belanja Aparatur naik menjadi sebesar 54,86 % dan sedangkan belanja pembangunan dan kemasyarakatan atau publik turun menjadi sebesar 45,37 %

Kata Kunci : Pengukuran; kinerja; belanja; daerah; aparatur; publik.

-
1. Bahan disajikan pada acara professor present pada tanggal 2 Mei di hotel selyca Samarinda
 2. Guru besar ekonomi pembanguana dan keuangan negara & daerah / Rektor Universitas Widyagama Mahakam Samarinda

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengukuran kinerja belanja daerah dapat dijadikan sebagai tolak ukur pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Satu dari berbagai cara yang digunakan untuk mengukur keberhasilan adalah menggunakan analisis rasio belanja daerah dengan cara membandingkan belanja tidak langsung dan belanja langsung serta dapat pula mengelompokkan anggaran yang fokus untuk belanja daerah guna belanja aparatur dan belanja publik. Pertanggungjawaban kepada publik merupakan tuntutan yang harus dipenuhi, Berdasarkan uraian tersebut, dilakukan penelitian. Mengingat keterbatasan dokumen yang diperoleh, maka dilakukan Kajian kinerja belanja daerah tahun 2013. Penelitian ini ditetapkan judul "Analisis Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur".

2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian untuk mengetahui besaran belanja tidak langsung dan belanja langsung dan belanja daerah untuk aparatur dan publik. Sedangkan manfaat penelitian bagi Pemerintah daerah dapat digunakan sebagai bahan koreksi untuk meningkatkan kinerja belanja daerah pada tahun berikutnya. serta bagi masyarakat digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja belanja daerah juga dapat pula dijadikan oleh penelitian selanjutnya.

B. KAJIAN TEORITIS

Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara diantaranya menegaskan pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Instrumen kebijakan anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan kemajuan daerah dan negara.

Undang – undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan, memuat ketentuan yang mendorong profesionalitas dan menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. Dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, diperlukan kaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan fungsi perbendaharaan tersebut meliputi perencanaan kas yang baik, pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang menganggur untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.

Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dan pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.. Selain itu ada pula pendapatan asli daerah. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan yang dikenal dengan pendapatan asli daerah baik bersumber dari pajak daerah maupun retribusi daerah

Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Pemerintah selaku perumus dan pelaksanaan kebijakan anggaran berkewajiban untuk terbuka dan bertanggungjawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan, bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas.

Permendagri nomor 13 tahun 2006 jo 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, akibat penyelenggaraan pemerintah daerah menimbulkan aktivitas yang tidak sedikit. hal itu harus diikuti dengan adanya suatu sistem pengelolaan keuangan daerah untuk mengelolanya.

Perencanaan keuangan daerah, dilaksanakan proses diawali penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategi Pembangunan Daerah (Renstra), Prioritas Anggaran (PA), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kemudian dituangkan penjabaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun.

C. METODE PENELITIAN.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan fokus penelitian pada penyusunan dan penggunaan anggaran untuk belanja daerah tahun 2013

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang menggunakan dan mengkaji data-data yang diperoleh dan menarik kesimpulan dari hasil kajian. Studi kasus ini bertujuan untuk memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah untuk roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dan bersifat kuantitatif, berbentuk penjabaran APBD pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013

4. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dari APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dikelompokkan menjadi Belanja tidak langsung dan belanja langsung serta belanja aparatur dan belanja publik. Kemudian dikaji dengan metode kuantitatif dengan cara perhitungan rasio belanja daerah, Formula yang digunakan adalah :

$$1. \text{ PBTL} = \frac{\sum \text{BTL}}{\sum \text{B}} \times 100\%$$

$$2. \text{ PBL} = \frac{\sum \text{BL}}{\sum \text{B}} \times 100 \%$$

$$3. \text{ PBA} = \frac{\sum \text{BA}}{\sum \text{B}} \times 100 \%$$

$$4. \text{ PBP} = \frac{\sum \text{BP}}{\sum \text{B}} \times 100\%$$

Notasi : PBTL = Proporsi Belanja Tidak Langsung

PBL = Proporsi Belanja Langsung

PBA = Proporsi Belanja Aparatur
PBP = Proporsi Belanja Publik
BTL = Belanja Tidak Langsung
B = Belanja
BL = Belanja Langsung
BA = Belanja Aparatur
BP = Belanja Publik

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013, sebagaimana tabel 1 dibawah ini :

| SKPD | ALOKASI ANGGARAN | | JUMLAH | BELANJA | |
|------|------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | BELANJA TL | BELANJA L | | APARATUR | PUBLIC |
| 1 | 29.468.568 | 559.999.812 | 589.468.380 | 59.739.966 | 500.259.846 |
| 2 | 34.376.511 | 93.925.269 | 128.301.780 | 19.218.464 | 74.706.805 |
| 3 | 77.955.912 | 279.050.000 | 357.005.912 | 3.716.050 | 275.333.950 |
| 4 | 67.427.460 | 285.949.999 | 353.377.459 | 6.870.474 | 279.079.525 |
| 5 | 40.898.540 | 209.000.000 | 249.898.540 | 4.015.624 | 204.948.376 |
| 6 | 14.902.229 | 57.000.000 | 71.902.229 | 8.329.770 | 48.670.230 |
| 7 | 50.547.128 | 2.744.638.892 | 2.795.186.020 | 12.336.070 | 2.723.302.822 |
| 8 | 12.151.145 | 49.655.000 | 61.806.145 | 28.602.215 | 21.052.785 |
| 9 | 6.863.701 | 12.629.400 | 19.493.101 | 8.026.900 | 4.602.500 |
| 10 | 10.940.793 | 581.329.900 | 592.270.693 | 6.891.877 | 547.438.023 |
| 11 | 7.941.224 | 15.520.000 | 23.461.224 | 9.064.486 | 6.455.514 |
| 12 | 4.566.805 | 16.494.191 | 21.060.996 | 7.341.806 | 9.152.385 |
| 13 | 21.985.679 | 47.100.000 | 69.085.679 | 10.764.957 | 36.355.043 |
| 14 | 19.753.570 | 66.500.000 | 86.253.570 | 25.019.054 | 41.480.946 |
| 15 | 18.694.204 | 112.383.000 | 131.077.204 | 16.106.649 | 96.276.351 |
| 16 | 6.539.307 | 15.950.000 | 22.489.307 | 7.282.686 | 8.677.314 |
| 17 | 10.925.455 | 180.115.482 | 191.040.937 | 19.629.821 | 160.485.661 |
| 18 | 5.384.198 | 19.078.500 | 24.462.698 | 14.898.048 | 4.180.452 |
| 19 | 7.432.875 | 30.782.435 | 38.215.310 | 5.634.590 | 25.417.845 |
| 20 | 5.457.740 | 27.499.197 | 32.956.937 | 9.120.070 | 18.379.127 |
| 21 | 21.447.068 | - | 21.447.068 | - | - |
| 22 | 7.926.078 | - | 7.926.078 | - | - |
| 23 | 5.488.801.654 | 205.597.878 | 5.694.399.532 | 96.398.846 | 109.199.032 |
| 24 | 10.937.616 | 125.300.000 | 136.237.616 | 59.890.300 | 65.409.700 |
| 25 | 11.626.768 | 15.560.000 | 27.186.768 | 9.834.958 | 5.725.042 |
| 26 | 7.729.774 | 10.000.000 | 17.729.774 | 7.889.425 | 2.110575 |
| 27 | 1.839.600 | 31.629.528 | 33.469.128 | 2.419.560 | 29.209.968 |
| 28 | 7.814.671 | 44.499.272.400 | 52.313.943 | 11.051.036 | 44.488.221.364 |
| 29 | 6.108.822 | 61.700.400 | 67.809.222 | 13.648.712 | 48.051.688 |
| 30 | 187.524.797 | 93.180.290 | 280.705.087 | 34.925.525 | 58.254.765 |
| 31 | 6.773.929 | 25.873.796 | 32.647.725 | 11.211.280 | 14.662.516 |
| 32 | 5.355.826 | 29.026.075 | 34.381.901 | 10.705.023 | 18.321.052 |
| 33 | 6.572.500 | 14.205.540 | 20.778.040 | 4.668.145 | 9.537.395 |
| 34 | 5.343.265 | 52.076.000 | 57.419.265 | 12.568.239 | 39.507.716 |
| 35 | 1.104.878 | 3.800.000 | 4.904.878 | 2.567.742 | 1.232.258 |
| 36 | 8.379.572 | 18.109.610 | 26.489.182 | 5.738.997 | 12.370.613 |
| 37 | 22.170.820 | 85.680.940 | 107.851.760 | 27.210.792 | 58.470.148 |
| 38 | 11.838.658 | 46.439.050 | 58.277.708 | 12.957.320 | 33.481.730 |
| 39 | 11.563.468 | 61.766.250 | 73.329.718 | 13.604.660 | 48.161.590 |
| 40 | 47.646.993 | 39.180.010 | 86.827.003 | 19.030.805 | 20.149.205 |
| 41 | 8.366.352 | 37.390.000 | 45.756.352 | 8.558.170 | 28.831.830 |
| 42 | 13.032.739 | 56.725.000 | 69.757.739 | 15.250.496 | 41.474.504 |
| 43 | 17.362.944 | 66.147.447 | 83.510.391 | 13.464.945 | 52.628.502 |
| JLH | 6.371.511.836 | 6.528.488.163 | 12.900.000.000 | 676.204.560 | 5.852.283.603 |

Sumber : Penjabaran APBD 2013 : data diolah kembali

Data tersebut dianalisis berdasarkan formula analisis data, pada bagian 5 , hasil data S ebagai berikut :

1. Proporsi Belanja TidakLangsung = $\frac{\text{Rp. 6.371.551,-}}{\text{Rp. 12.900.000.000,-}} \times 100 \% = 49,39 \%$
2. Proporsi Belanja Langsung = $\frac{\text{Rp. 6.258.484,-}}{\text{Rp. 12.900.000.000,-}} \times 100 \% = 50,61 \%$
3. Proporsi Belanja Aparatur = $\frac{\text{Rp. 676.204.560,-}}{\text{Rp. 12.900.000.000,-}} \times 100 \% = 54,86 \%$
4. Proporsi Belanja Publik = $\frac{\text{Rp.5.852.283.603,-}}{\text{Rp. 12.900.000.000,-}} \times 100 \% = 45,37 \%$

Hasil perhitungan formulasi tersebut dianalisis, ternyata belanja tidak langsung sebenarnya merupakan belanja untuk roda pemerintahan sebesar 49,39 % dari jumlah belanja daerah. Sedangkan belanja langsung, dana tersebut digunakan untuk roda pembangunan dan kemasyarakatan sebesar 50,61 %. Dengan demikian terdapat perbandingan yang kurang lebih sama antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung. Dalam rangka percepatan pembangunan pro rakyat seharusnya belanja langsung jauh lebih besar, sebab semakin besar belanja tersebut semakin baik karena merupakan penggerak dan pendorong perekonomian daerah.

Setelah dilihat kembali penggunaan belanja langsung yang digadang sebagai belanja pembangunan dan kemasyarakatan ternyata didalam penjabaran terdapat honorair dan belanja perjalanan dinas untuk kepentingan aparatur, sehingga mengurangi belanja pembangunan dan kemasyarakatan atau publik. Hasilnya untuk belanja Aparatur naik menjadi sebesar 54,86 % dan sedangkan belanja pembangunan dan kemasyarakatan atau publik turun menjadi sebesar 45,37 %

Kondisi ini harus dilakukan transformasi kinerja belanja daerah, untuk mempercepat ekonomi tumbuh dan berkembang, belanja harus diarahkan lebih banyak belanja pembangunan dan kemasyarakatan atau belanja publik, bukan sebaliknya belanja tidak langsung atau belanja aparatur dimana belanja tersebut berputar untuk roda pemerintahan atau penyelenggara pemerintahan.

E. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

1. Kesimpulan

Berdasar hasil kajian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penggunaan belanja tidak langsung sebenarnya merupakan belanja untuk roda pemerintahan sebesar 49,39 % dari jumlah belanja daerah. Sedangkan belanja langsung, dana tersebut digunakan untuk roda pembangunan dan kemasyarakatan sebesar 50,61 %.
- b. Penggunaan belanja langsung yang digadang sebagai belanja pembangunan dan kemasyarakatan ternyata didalam penjabaran terdapat honorair dan belanja perjalanan dinas untuk kepentingan aparatur. Hasilnya untuk belanja Aparatur naik menjadi sebesar 54,86 % sedangkan belanja pembangunan dan kemasyarakatan atau publik turun menjadi sebesar 45,37 %

2. Implikasi

- a. Bagi pemerintah daerah
Kondisi ini harus dilakukan transformasi kinerja belanja daerah, untuk mempercepat perekonomian tumbuh dan berkembang, belanja harus diarahkan lebih banyak belanja pembangunan dan kemasyarakatan atau belanja publik,
- b. Bagi Peneliti selanjutnya
Peneliti selanjutnya yang akan melakukan hal yang sama diharapkan mampu melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai kinerja belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang – undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang undang Nomor 28 tahun Permendagri nomor 13 tahun 2006 jo 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013.